

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mencoba memilih judul “Transisi Revolusi Mesir 2011”

dengan alasan :

Pertama, penulis tertarik dengan Transisi menuju demokrasi dalam Revolusi Mesir”

Revolusi yang terjadi di Mesir Merupakan Fenomena yang menarik serta unik di Teliti Karena rezim otoriter yang telah membelenggu Mesir selama 30 tahun ini¹,Oleh karena itu momentum seperti ini patut untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan studi yang sedang ditekuni penulis yaitu tentang Ilmu Hubungan Internasional.

Kedua, penulis mengambil objek penelitian Transisi dalam revolusi Mesir.

Ketiga, penulis melihat bahwa judul yang penulis ajukan belum pernah ditulis oleh penulis lain.

Dengan ketiga alasan diatas itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang

“Transisi Revolusi Mesir 2011”

¹ <http://politikana.com/baca/2011/02/12/junta-militer-ala-pentagon-berhasil-ambil-alih-kekuasaan-di-mesir.html> di akses pada tgl 20/09/2011

B. Tujuan penulisan

1. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada guna memperoleh jawaban sekaligus membuktikan hipotesa yang disusun oleh penulis.
2. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang “Transisi revolusi Mesir 2011”
3. Penulisan ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran tentang Transisi dalam revolusi Mesir.
4. Selain itu penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama kuliah.
5. Penulisan ini merupakan suatu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Hosni Mubarak merupakan Presiden yang terkenal dengan sifat tegas dan otoriter, di samping juga terkenal dengan sifatnya yang kontroversial. Selama masa kepemimpinannya berbagai aksi demonstrasi yang menentang pemerintahan selalu dilarang dan bahkan dilawan dengan sikap represif aparat keamanan. Sikap otoriter presiden juga ditunjukkan dengan adanya kontrol yang ketat terhadap media massa di Mesir. Selama 30 tahun masa kepemimpinannya, Hosni Mubarak telah berhasil membuat demokrasi semu, dimana pemilihan presiden hanya diisi satu kandidat tunggal. Keberadaan partai oposisi juga selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan partai pemerintah.

Bentuk demokrasi semu yang diimplementasikan oleh Pemerintah Mesir membuat sistem pengawasan parlemen terhadap jalannya pemerintahan tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga memunculkan sikap sewenang-wenang pemerintah, buruknya birokrasi pemerintahan yang kental akan nuansa KKN, dan tidak terserapnya aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Hal ini yang membuat rakyat gerah dan ingin menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak yang telah 30 tahun menjabat sebagai presiden yang otoriter dan kebijakan-kebijakannya tidak pernah memihak kepada rakyat. Timbul lah gejolak demonstrasi yang berlangsung selama seminggu di Mesir. Terjadilah peristiwa bentrok massa pro dan kontra Hosni Mubarak yang terjadi di Lapangan Tahrir.

Pada masa pemerintahan Hosni Mubarak sistem pemilu yang diterapkan bersifat kandidat tunggal, terjadi pergeseran alokasi kekuasaan yang bersifat sentralistik. Pemerintah Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden. Selama ini presiden dalam pemilu dipilih sebagai kandidat tunggal. Hal tersebut menyebabkan sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter-militeristik dan mengindikasikan terjadinya KKN.

Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai. Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu².

Presiden dipilih untuk masa jabatan enam tahun (tanpa batas masa jabatan), kekuatan militer Mubarak sangat kuat, sehingga berhasil menekan kekuatan oposisi walaupun seradikal Ikhwanul Muslimin. Bahkan pada masa Mubarak menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang.

² <http://blog.re.or.id/mesir.html>, diakses tanggal 28/05/2011, jam 11.48 WIB

Lembaga eksekutif Legitimasi eksekutif berada ditangan presiden, sampai tahun 2005 presiden tidak dipilih suara rakyat tetapi dicalonkan oleh dua-pertiga dari Majelis Rakyat (majelis Al-Shaab) kemudian disetujui oleh referendum popoler. Hal demikian menyebabkan otoritarianisme berkembang pesat di Mesir dan pemerintahan Mubarak berlangsung langgeng sampai 5 periode budaya politik paternalistic di kalangan para pejabat menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme terus meraja rela, sehingga ada kecenderungan pemerintahan mengarah pada otoritarianisme. Lembaga legislatif Presiden mempunyai pengaruh besar dalam proses nominasi lembaga legislatif sampai tahun 2005. Mosi tidak percaya dapat diberikan kepada setiap menteri, wakilmenteri, atau wakil perdana menteri namun mosi tidak percaya tidak memiliki kekuatan kepada perdana menteri. Semenjak Presiden Mubarak berkuasa.

Berdasarkan data di Kemlu Indo Penulis Melihat GDP Mesir pada tahun 2009-2010 mencapai USD 202,7 miliar sedangkan untuk tahun 2010-2011 mencapai USD 206,4 miliar,lalu di lanjutkan dengan GDP perkapita untuk Mesir sendiri pada tahun 2009-2010 adalah USD 2.605 sedangkan pada tahun 2010-2011 mencapai USD 2.652 pertumbuhan ekonomi mesir pun antara 2009 -2010 sampai ke 2010-2011 pada saat paca runtuhnya mubarak menurun dari angka 5,1% di 2010 menurun hingga menjadi 1,8% pada 2011 dibandingkan dengan Negara Tunisia yang mempunyai Penurunan ekonomi 1,3% pasca Revolusi masih lebih baik Mesir walaupun GDP dan Pendapatan Perkapita Tunisa Lebih tinggi Dari Mesir.

Pengangguran cukup tinggi di Mesir yakni mencapai 12% Dari total angkatan yang Kerja. Pengangguran juga diperkuat dengan adanya kesempatan warga Mesir untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Pada umumnya lapangan pekerjaan ini berupa badan usaha negara yang dikuasai oleh pemerintah yang cenderung ber tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengangguran menyebabkan penghasilan masyarakat Mesir rendah, karena secara terpaksa seluruhnya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari guna menanggung kebutuhan orang yang menganggur dalam keluarganya. Akibatnya tabungan nasional cenderung rendah sehingga menyebabkan investasi dalam negeri yang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi Mesir menurun. Keadaan ini semakin diperparah dengan jumlah modal perkapita terus berkurang akibat tingkat pertumbuhan penduduk pertahun yang lebih cepat dari tingkat akumulasi modal.

Di satu sisi AS mendukung pemerintahan Mubarak, tetapi di lain sisi mendukung aksi protes yang dilakukan di Mesir. Strategi ganda ini membuat AS leluasa dalam menghancurkan negara kecil seperti Tunisia dan Mesir. Strategi ganda dipakai AS untuk menghancurkan satu pemerintahan otoriter yang dinilai sudah tidak sejalan dengan hegemoni AS. Strategi ganda ini bertujuan merubah transisi pemerintahan dan pola kepemimpinan yang otoriter menjadi lebih demokratis, meskipun diterapkan dengan kekerasan dan perang. Menteri pertahanan Amerika, Robert Gates mengatakan³ sangat mendesak bagi pemerintahan Presiden Hosni Mubarak untuk melangkah maju dan memenuhi janji-janji reformasinya. Gates mengatakan penting bagi Mesir untuk menjalankan transisi politik secara bertahap dimana rakyat bisa melihat

kemajuan Mesir yang lebih mantap dan dinamis. Demonstrasi-demonstrasi pro demokrasi di Mesir dan Tunisia seharusnya mendorong pemerintahan untuk bergerak ke arah yang lebih positif guna menyelesaikan beban politik dan ekonomi rakyat mereka³.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Mesir pada masa Mubarak justru menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti mengundang kekuatan asing untuk menyelesaikan masalah internal, misalnya membantu pemerintahan yang syah untuk menumpas oposan. Masalah semakin rumit karena oposan juga melakukan koalisi dengan kekuatan asing untuk menggulingkan penguasa. Mohamed ElBaradei, mantan direktur Badan

Tenaga Atom PBB sebagai oposan Mubarak yang bernaung dalam organisasi Ikhwanul Muslimin mendapat dukungan dari AS untuk melakukan demonstrasi walaupun sebelumnya AS mendukung Mubarak dalam setiap kebijakan politik dan pemerintahannya. Mesir telah melakukan kerjasama secara intens dengan AS semenjak Presiden Mesir ke-2, Anwar Sadat mendesak AS untuk melibatkan diri dalam penyelesaian sengketa Arab-Israel pada perang Oktober 1973. Pengaruh AS semakin kuat pada masa Mubarak, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan Israel. Mubarak bekerja sama dengan AS dalam modernisasi militer guna menambah kuantitas persenjataan dan perombakan strukturisasi dalam tubuh militer Mesir.

³ <http://www.voanews.com/indonesian/news/special-report/politics/Demonstrasi-di-Mesir-11490234.html>, diakses tanggal 18 April 2011

Terinspirasi kejatuhan Presiden Ben Ali di Tunisia, ribuan rakyat Mesir menuntut diakhirinya kekuasaan Presiden Mubarak dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran yang pada akhirnya menimbulkan bentrokan antara demonstran dan polisi⁴. Aspirasi politik kian terbuka lebar dengan kemajuan teknologi internet, situs jejaring sosial berhasil menggalang massa secara massal dalam proses penggulingan rezim Hosni Mubarak. Warga Mesir melakukan pertukaran informasi secara simultan dengan penduduk Tunisia melalui Facebook dan Twitter⁵.

Aksi revolusioner sipil menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menumbangkan rezim Mubarak berkumpul di Lapangan Tahrir saat jam malam, menuntut Mubarak mundur. Selain itu juga diperkuat dengan kondisi geografis Mesir yang berdekatan dengan Tunisia, hanya terpisah dengan Libya. Krisis Tunisia mendorong sebagian warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih kondusif, mereka akan cenderung mengungsi ke daerah yang lebih dekat yaitu Mesir sebagai negara tetangga yang mempunyai pertahanan dan keamanan yang kuat. Mengingat tentara Mesir adalah kekuatan militer nomor 10 terbesar di dunia⁶, ada saat itu belum terjadinya instabilitas di Mesir. Pertukaran informasi melalui komunikasi langsung memicukan rakyat Mesir untuk melakukan hal serupa dengan melakukan demonstrasi besar-besaran seperti di Tunisia.

⁴ politik.kompasiana.com/.../melihat-mesir-dengan-kaca-mata-berbeda/ di akses pada 23-08-2011

⁵ magazindo.com/tag/demonstrasi/page/2/ di akses pada tgl 23-08-2011

⁶ <http://rimanews.com/read/20110207/15592/mantan-jenderal-dan-kepala-badan-intelejen-mesir-omar-suleiman-bakal-pengganti>, diakses tanggal 18 April 2011

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan yaitu bagaimana Pola Transisi Demokarasi Di Mesir.

E.Landasan Teori

Transisi Demokrasi

Transisi dari rezim otoriter dimulai dari perpaduan antara perpecahan elite maupun bangkitnya masyarakat sipil dan oposisi yang memungkinkan transisi berjalan. Transformasi dari atas atau lewat negosiasi (*transplacement*) antara kubu garis keras dan kubu garis lunak yang beraliansi dengan barisan oposisi dan masyarakat sipil. Permulaan jalur-jalur negosiasi itulah yang membuahkan transisi yang mulus dan sempurna dari rezim otoriter korporatif sehingga sangat mempermudah tugas-tugas konsolidasi demokrasi berikutnya.

Demokratisasi pada tingkatan yang sederhana mencakup (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter, (2) dibangunnya sebuah rezim demokrasi, (3) konsolidasi⁷. demokratisasi berarti Proses perubahan rezim otoritarian (hegemoni tertutup) yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarki yang memberi derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi Usasi yang lebih tinggi⁸. Transisi demokrasi pada suatu negara terjadi apabila terjadi pertumbuhan ekonomi dan penambahan masyarakat terdidik dengan masyarakat yang telah sejahtera secara ekonomi dan semakin tingginya tingkat pendidikan akan semakin

⁷ Samuel Huntington (1991:44)

⁸ Robert A. Dahl (1991:54),

terbuka mekanisme pengambilan keputusan untuk urusan-urusan publik, dan semakin terbukanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang penting, yang menyangkut kepentingan publik⁹.

Sistem politik yang demokratis sudah ada sejak jaman Yunani ataupun timbul di desa, namun Huntington mencatat demokrasi negara-kebangsaan timbul dalam tiga gelombang dimasa modern. yaitu :

- Gelombang Panjang Demokratisasi pertama 1828 -1926
- Gelombang balik pertama 1922-1942
- Gelombang Pendek Demokratisasi kedua 1943-1962
- Gelombang balik kedua 1958-1975
- Gelombang Demokratisasi ketiga 1974 -

Gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi dari rejim non demokratis ke rejim demokratis yang terjadi didalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Gelombang demokratisasi pertama berakar pada revolusi Perancis dan Revolusi Amerika namun kemunculan lembaga-lembaga demokrasi nasional yang sesungguhnya merupakan fenomena abad XIX. Negeri-negeri lain lambat laun memperluas hak memberikan suara, mengurangi jumlah pemberian suara ganda, memperkenalkan sistem pemberian suara secara rahasia, menetapkan tanggung jawab perdana menteri dan kabinet kepada parlemen. Namun sejarah bukanlah sesuatu yang teratur dan perubahan politik tidak dapat dipilah-pilah agar dapat

⁹ Lipset (1963)

masuk kedalam kotak sejarah yang rapi. Sejarah juga tak bergerak ke satu arah. Masing-masing dari gelombang demokratisasi diikuti oleh sebuah gelombang balik dimana sebagian negeri sebelumnya telah beralih ke sistem demokrasi berbalik ke sistem non demokratis¹⁰.

Kecenderungan demokrasi telah semakin mengecil dan berbelok. Perkembangan politik dalam dasa warsa 1920-1930 bergeser menjauhi demokrasi dan bergerak kembali ke bentuk-bentuk tradisional pemerintahan otoriter atau diperkenalkannya totalitarisme yang berlandaskan pada massa yang lebih brutal dan ganas.

Berawal pada tahun 1922 dengan dicampakkannya demokrasi di Italia yang rapuh dan korup secara mudah oleh Mussolini, lembaga demokrasi yang lebih muda di Lithuania, Polandia, Latvia, dan Estonia digulingkan oleh kudeta militer, demokrasi di Portugal akhirnya menyerah dalam suatu kudeta militer di tahun 1926 yang kemudian melahirkan diktator Salazar.

Gelombang demokratisasi kedua muncul pada Perang Dunia II. Pendudukan sekutu memaksa lahirnya lembaga-lembaga demokrasi di Jerman Barat, Italia, Austria, Jepang dan Korea. Sementara itu masa awal berakhirnya masa kekuasaan kolonial barat menghasilkan sejumlah negara baru yang mencoba menerapkan demokrasi.

Menjelang awal dasawarsa 1960 perkembangan politik dan transisi rejim mengambil bentuk yang sangat otoriter. Perubahan paling dramatis terjadi di

¹⁰ Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi, Grafiti, 20001

Amerika Latin. Pergeseran kearah otoritarianisme dimulai di Peru pada tahun 1962 ketika pihak militer campur tangan untuk mengubah hasil pemilu. Pada tahun 1964 kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil di Brazil dan Bolivia, pada tahun 1973 rejim militer mengambil pemerintahan di Uruguay dan Chili.

Di Asia pihak militer di Pakistan telah memaksa suatu rejim berdasarkan hukum darurat perang pada tahun 1958. Pada dasa warsa 1950 Syngman Rhee mulai menggerogoti prosedur demokrasi di Korea. Dalam tahun 1957 Sukarno menggantikan demokrasi Parleenter dengan Demokrasi Terpimpin dan 1965 tentara Indonesia mengakhirinya dan mengambil alih kekuasaan.

Gelombang demokratisasi ketiga diawali dengan runtuhnya kediktatoran Marcello Caetano pada tahun 1974 di Portugal dan bergerak menuju Amerika Latin. Pada tahun 1977 pemimpin militer di Ekuador mengumumkan keinginan mereka untuk mengundurkan diri dari dunia politik sebuah UU dasar baru dirancang pada tahun 1978 dan pemilu 1979 menghasilkan pemerintahan sipil.

Dalam proyek Woodrow Wilson Centre mengenai Transisi dari pemerintahan Otoritarian : Prospek bagi demokrasi di Amerika latin disebutkan bahwa rejim yang bergerak kearah demokrasi umumnya berbentuk otoriter birokratik, meski dalam beberapa hal masing-masing rejim mempunyai perbedaan.

F. Kerangka Analisis

Untuk menyederhanakan Pembahasan di atas penulis mencoba membuat kerangka analisis untuk membahas Transisi Revolusi Mesir berdasarkan Pola Transisi menurut Huntington :

Transformasi

Terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokratisasi. Proses transformasi terjadi jika muncul kelompok pembaharu dalam rejim yang berkuasa. Pembaharuan tersebut terjadi jika diktator tersebut meninggal, atau pergantian pemimpin secara berkala atau mungkin dengan kudeta pemimpin (Velasco dikudeta Morales Bermudes, Peru). Pembaharu percaya bahwa demokratisasi akan memberi manfaat bagi mereka sendiri misalnya meningkatkan legitimasi internasional, membuka bantuan IMF, dan mengurangi sanksi Amerika atau negara lain terhadap rejim mereka

Replacement

Ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi dan rejim otoriter tumbang atau digulingkan. Demokratisasi bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Kelompok yang dulunya oposisi kini berkuasa. Proses replacent diawali dari upaya penggulingan rejim, tumbangnya rejim dan perjuangan mewujudkan demokrasi. Citra populer transisi menuju demokrasi dengan ditumbangkannya pemerintah otoriter yang represif oleh kekuatan rakyat (people power), pengerahan massal warga negara yang menuntut

dan akhirnya memaksakan perubahan rejim terjadi di Pilipina, Jerman Timur dan Rumania.

Transplacement

Terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan tindakan hasil bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Hal ini terjadi jika antara pemerintah dan oposisi tidak bisa mengambil kebijakan politik secara sepihak. Dalam kondisi seperti ini rejim tidak memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan kekuasaan secara represif ataupun bergerak secara pasti menuju demokrasi. Biasanya yang terjadi adalah kompromi untuk melakukan demokrasi yang terbatas.

Perlu ditambahkan disini bahwa dalam rejim otoriter selama masa kekuasaannya biasanya adalah memberikan kesempatan bagi kelompok oposisi yang mendapatkan restu ataupun dengan pembatasan-pembatasan dan pengkebirian sehingga ada alternatif lain kategori yang dikemukakan oleh Huntington.

Intervensi

Intervensi seperti yang dialami oleh Grenada dan Panama di mana institusi demokratis lahir melalui paksaan dari kekuatan luar atau actor utama dalam terjadinya transisi demokrasi adalah dari kuatnya dorongan dari intervensi asing¹¹.

¹¹ Roskin, Micael G., et. al., *Political Science an Introduction, 3rd Ed.*, Englewood Cliffs, N. J.; Prentice Hall, 1988

Berdasarkan Pola Transisi di atas maka penulis mencoba mencocokkan pola replacement dalam aktualisasi transisi revolusi mesir karena dari ke 4 pola yang ada di atas ciri ciri transisi revolusi mesir cenderung mengarah ke replacement walaupun pola intervensi sedikit mirip dengan transisi revolusi mesir akan tetapi karena ciri ciri transisi di mesir muncul kebanyakan cenderung mengarahkan ke replacement kemudian aktualisasi replacement dalam transisi revolusi mesir penulis mencoba menambahkan aplikasi factor eksternal untuk memperkuat alasan penulis dalam menganalisis data yang akan nantinya dibahas di bab IV.

G. Hipotesis

Pengaruh dari Rumusan Masalah sebelumnya maka penulis dapat mengambil hipotesa sebagai berikut : Pola transisi yang terjadi dalam Revolusi Mesir adalah menggunakan pola Replacement dengan di tandai menguatnya oposisi dalam transisi Revolusi di Mesir, berkurangnya dukungan Internasional terhadap Mubarak serta adanya perubahan rezim psaca runtuhnya rezim Mubarak.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksplanatif, menjelaskan berdasarkan fakta, fenomena dan peristiwa yang diketahui melalui data yang dikumpulkan dari studi pustaka. Data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, compact disc dan juga situs-situs internet. Dari data-data yang terkumpul kemudian di sesuaikan dengan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan, Bab ini berisi Alasan pemilihan judul, Tujuan penulisan, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Landasan teori, kerangka analisis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Dinamika Politik Di Mesir sebelum Revolusi Mesir 2011, Bab ini akan menjelaskan tentang Deskripsi kondisi Politik Di Mesir Sebelum Terjadinya Revolusi.

Bab III, Pola Transisi Demokrasi Di Timur Tengah Dan Afrika Utara, Bab ini akan menggambarkan Pola Pola Revolusi yang Terjadi Di berbagai Negara Timur Tengah Dan Afrika Utara.

Bab IV, Aktualisasi transisi demokrasi Replacement dalam revolusi Mesir : Bab ini akan berisi tentang analisa Aktualisasi Transisi Demokrasi pola Replacement di Mesir.

Bab V, Kesimpulan tentang analisa dari bab-bab sebelumnya.